



Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan

Muhammad Arief Pramusty

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: mariefpramusty@gmail.com

Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fadhilahahmad@uinsu.ac.id

Abstract. *This study describes and explains the budget realization for the last five years, starting from 2018 to 2022, by paying attention to the percentage change between the budget value and the realization of the regional income and expenditure budget each year. The purpose of this study is to evaluate the performance of regional revenue and expenditure budget realization in the regional asset finance agency of the Medan City government during the 2018-2022 period. This study also aims to compare the effectiveness of budget realization during that period. The research method used is descriptive qualitative using secondary data sources and documentation study data collection techniques. Data analysis involves revenue variance analysis, degree of decentralization ratio, local tax effectiveness ratio analysis, and expenditure budget variance analysis. The results show a problem, where the realization of the regional revenue and expenditure budget in 2019-2020 has increased, even though it should have decreased due to the impact of the COVID-19 pandemic. This problem is related to the loss of funds worth 1.6 million which has been handled by Law Enforcement Officials.*

Keywords: *Budget, Performance, Budget Realization*

Abstrak. Penelitian ini menguraikan dan menjelaskan realisasi anggaran selama lima tahun terakhir, mulai dari tahun 2018 hingga 2022, dengan memperhatikan perubahan persentase antara nilai anggaran dan realisasi anggaran pendapatan serta belanja daerah setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di badan keuangan aset daerah pemerintah Kota Medan selama periode 2018-2022. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan efektivitas realisasi anggaran selama periode tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder dan teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Analisis data melibatkan analisis varians pendapatan, rasio derajat desentralisasi, analisis rasio efektivitas pajak daerah, dan analisis varians anggaran belanja. Hasil penelitian menunjukkan adanya masalah, di mana realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan, meskipun seharusnya mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID-19. Masalah ini berkaitan dengan hilangnya dana senilai 1,6 juta yang telah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum.

Kata kunci: Anggaran, Kinerja, Realisasi Anggaran

LATAR BELAKANG

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kinerja direncanakan oleh Kantor BKAD Pemerintah Kota Medan sesuai dengan aturan peraturan daerah dan gubernur. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur perubahan APBN Tahun Anggaran 2022 merupakan salah satu klausul tersebut. Tanggal keputusan ini adalah 24 Oktober 2022. Lebih lanjut, ditegaskan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera

Received: November 10, 2023; Accepted: Desember 10, 2023; Published: Desember 30, 2023

* Muhammad Arief Pramusty, mariefpramusty@gmail.com

Utara Nomor 34 Tahun 2022 bahwa rincian APBD Tahun 2022 harus disampaikan paling lambat tanggal 24 Oktober 2022. Pejabat yang menyusun laporan keuangan wajib mencantumkan data kinerja yang terkait dengan laporan keuangan dalam upaya meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah.

Kepala unit kerja perangkat daerah harus secara khusus menyatakan bahwa laporan keuangan disusun dengan menggunakan sistem pengendalian intern yang memadai dan data yang dicantumkannya disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan pemerintah ini berfungsi sebagai dasar bagi unit kerja pengguna anggaran, pelaporan penyusunan laporan keuangan entitas, dan penyajian laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk audit. Selanjutnya diatur dalam peraturan ini adalah tata cara pengajuan usulan peraturan daerah atau rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa peraturan pemerintah ini tidak mengontrol setiap aspek laporan pertanggungjawaban untuk pelaksanaan APBN/APBD oleh DPRD atau penggunaan laporan oleh pihak yang berkepentingan. Tidak semua elemen ini dicakup oleh kerangka peraturan yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah ini.

Dalam bisnis regional, kinerja adalah ukuran seberapa baik perusahaan memenuhi kewajibannya dan mencapai tujuannya. Berbagai aspek dapat dipertimbangkan ketika mengevaluasi kinerja perusahaan, seperti efektivitas operasionalnya, kemampuan untuk memenuhi tujuan keuangan, penyediaan layanan publik, dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumatera Utara terus berkembang dan meningkatkan kapabilitasnya, khususnya di bidang pemberian layanan publik dan peningkatan kondisi keuangan daerah. Misalnya, BKAD Sumatera Utara telah menyisihkan Rp 11 miliar untuk upaya pemulihan setelah wabah.

Kegiatan-kegiatan ini mencakup sejumlah bidang yang berbeda, seperti membantu individu penyandang cacat, meningkatkan pasokan makanan melalui Layanan Sosial, dan berpartisipasi dalam program perlindungan sosial seperti membeli cabai merah dan benih bawang merah untuk meningkatkan hasil pertanian dan mengendalikan inflasi. Seiring dengan peningkatan ekonomi lokal, BKAD Sumatera Utara berharap bahwa kegiatan ini akan berdampak baik bagi lingkungan dan daerah

sekitarnya. Sejauh mana anggaran yang direncanakan dan disahkan benar-benar direalisasikan atau dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu disebut sebagai realisasi anggaran. Sebagai bagian dari prosedur ini, uang harus dilacak dan dilaporkan sesuai dengan jumlah anggaran yang dialokasikan.

Proses merealisasikan anggaran adalah melacak semua uang yang dihabiskan dan diterima selama jangka waktu tertentu dan menilai seberapa dekat jumlah aktual yang dihabiskan sesuai dengan rencana anggaran asli. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan bisnis lokal, menemukan perbedaan antara rencana dan kenyataan, dan membuat alokasi keuangan dan keputusan penggunaan yang lebih tepat, sangat penting untuk memahami realisasi anggaran. Setiap tahun atau setiap periode, BKAD Sumatera Utara secara resmi menyusun laporan realisasi anggaran. Laporan-laporan ini memberikan informasi tentang berapa banyak anggaran atau entitas pemerintah Kota Medan yang telah dilaksanakan atau direalisasikan. Laporan ini membandingkan pendapatan dan pengeluaran dengan anggaran yang dibuat sebelumnya. Transparansi, peningkatan akuntabilitas, dan penilaian kinerja keuangan bisnis Kota Medan adalah tujuannya. Peneliti melihat variasi nilai pendapatan dan belanja sebelum dan sesudah waktu dalam laporan realisasi anggaran tahunan BKAD Sumatera Utara.

Para peneliti BKAD Sumatera Utara akan menyelidiki dan menjelaskan penyebab perbedaan mencolok antara pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Medan. Pendapatan perusahaan lokal adalah semua bentuk uang yang diperoleh oleh perusahaan yang dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah daerah. Pendapatan transfer, pendapatan asli dari daerah tersebut, dan aliran pendapatan daerah lain yang disetujui adalah beberapa sumber yang mungkin dari aliran pendapatan ini. Pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung berbagai proyek dan kegiatan disebut sebagai "pengeluaran daerah". Belanja daerah di BKAD Sumatera Utara terdiri dari berbagai elemen, termasuk operasi, modal, transfer, dan biaya tak terduga. Informasi yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dan belanja akan disediakan oleh studi ini, dengan fokus pada laporan realisasi anggaran yang dihasilkan untuk pemerintah Kota Medan oleh BKAD Sumatera Utara

Tabel 1. Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2018	Rp. 13.037.539.478.554	Rp. 12.703.058.687.891	97,43
2019	Rp. 14.034.339.344.970	Rp. 13.081.482.296.509	93,21
2020	Rp. 13.077.362.353.824	Rp. 12.916.359.750.491	98,77
2021	Rp. 7.802.901.013.566	Rp. 8.099.422.537.756	103,80
2022	Rp. 5.768.960.383.789	Rp. 5.760.344.387.619	99,85

Sumber : Data yang diolah

Angka-angka berikut menampilkan pendapatan pemerintah daerah untuk BKAD Sumatera Utara selama lima tahun sebelumnya. Ada kenaikan 6,65% dalam realisasi anggaran antara tahun 2017 dan 2018. Pendapatan ini terdiri dari seluruh pendapatan daerah yang diterima selama Tahun Anggaran 2018 dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah oleh Bendahara Pendapatan SKPD dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, RSUD Haji Medan mengawasi sebagian pendapatannya sendiri sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ketika membandingkan realitas anggaran 2019 dengan anggaran 2018, ada kenaikan 2,96%.

Seluruh pendapatan daerah yang dihimpun oleh bendahara umum daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan bendahara pendapatan SKPD dimasukkan ke dalam rekening bendahara umum daerah selama tahun anggaran 2019. Sama seperti tahun lalu, RSUD Haji Medan menangani sebagian dari pendapatannya sendiri sebagai BLUD.

Ada penurunan 1,24% dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2020 dan 2019. Pendapatan ini terdiri dari seluruh penerimaan pendapatan daerah yang dikumpulkan oleh Bendahara Pendapatan SKPD dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selama Tahun Anggaran 2019, penerimaan pendapatan ini dicatat dalam Rekening Kas Umum Daerah. Tambahan pendapatan daerah dihasilkan oleh swakelola RSUD Haji Medan sebagai Badan Layanan Umum (BLUD). Pendapatan telah menurun dibandingkan dengan 2019, terutama dari sumber pendapatan daerah. Berbeda dengan target realisasi pendapatan tahun 2020, namun terjadi peningkatan. pendapatan dari porsi bagi hasil dari pelibatan modal pada BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD dan BUMN) menurun, sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan ini.

Telah terjadi kenaikan 8,65% dalam realisasi anggaran antara tahun 2020 dan 2021. Dibandingkan dengan tahun 2020, pendapatan sebagian besar tumbuh dari pos pendapatan transfer, pos pendapatan daerah lain yang dapat diterima, dan sumber

pendapatan asli daerah. Penyebab utama kenaikan ini adalah uang tambahan yang diterima dari hibah dari pemerintah pusat dan sumber lain sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Ada juga peningkatan dalam industri pajak lokal. Realisasi anggaran tahun 2022 turun 10,26% dibandingkan tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, total pendapatan mengalami penurunan, terutama dari pos dengan transfer revenue dan posko regional valid lainnya. Penurunan transfer dana Pemerintah Pusat menjadi penyebab penurunan pendapatan ini. Namun, pos Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kenaikan yang signifikan. Penyebab utama kenaikan ini adalah pengumpulan pajak air permukaan yang lebih tinggi dan uang yang lebih besar dari pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2. Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2018	Rp. 12.290.330.450.127	Rp. 10.993.656.938.251	89,45
2019	Rp. 14.726.662.153.406	Rp. 13.527.855.950.251	91,86
2020	Rp. 11.494.671.486.409	Rp. 10.935.643.264.218	95,14
2021	Rp. 2.659.960.360.858	Rp. 2.626.732.767.777	98,75
2022	Rp. 3.130.100.840.197	Rp. 3.199.554.286.746	102,22

Sumber : Data yang diolah

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017, realisasi belanja meningkat pada Tahun Anggaran 2018. Jika membandingkan Tahun Anggaran 2019 dengan Tahun Anggaran 2018, terjadi penurunan realisasi belanja sebesar 7,48%. Sementara itu, realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2020 tumbuh sebesar 7,51% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya yaitu 2019. Realisasi belanja meningkat sebesar 20,93% pada tahun anggaran 2021 dibandingkan dengan tahun anggaran 2020. Meskipun demikian, realisasi belanja pada Tahun Buku 2022 lebih rendah 5,42% dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, 2021.

Menurut penelitian pertama penulis di Pemkot Medan, pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan anggaran pemerintah daerah dinilai tidak efektif. Ketergantungan yang signifikan pada transfer dana asing dapat menyebabkan erosi otonomi daerah. Temuan ini memicu minat penulis untuk melakukan studi lebih lanjut untuk memahami dan menilai keberhasilan realitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik Pemerintah Kota Medan melaksanakan anggaran, dengan fokus pada tahun anggaran 2021-2022.

KAJIAN TEORITIS

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pemerintah, wakil rakyat, pihak yang berpartisipasi atau berkontribusi pada suatu tahap investasi, pinjaman, kontribusi, dan masyarakat adalah pihak-pihak yang diizinkan untuk memanfaatkan laporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pencapaian tingkat relevansi, kepercayaan, komparabilitas, dan pemahaman yang tepat untuk suatu laporan bergantung pada kualitas akun keuangan pemerintah tertentu, yang merupakan kebutuhan normatif. Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik, suatu instansi harus menangani operasional keuangan daerah seefisien mungkin (Ikriyati & Aprila, 2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa penggunaan teknik akuntansi yang dikenal dengan SAP digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, menjadi suatu keniscayaan yang memiliki implikasi hukum secara internal. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah aturan akuntansi yang menjadi dasar penyusunan dan distribusi laporan keuangan pemerintah. Penggunaan SAP merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan di lingkungan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini adalah komponen inisiatif untuk meningkatkan standar pelaporan keuangan Indonesia.

Ketika datang ke peraturan akuntansi pemerintah dan penyusunan laporan keuangan, SAP sangat penting. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengatur penerapan standar-standar ini dan berfungsi sebagai manual untuk meningkatkan kaliber laporan keuangan yang diterbitkan oleh Indonesia. Ini mengubah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. PP ini mencakup prinsip-prinsip akuntansi yang harus dipatuhi dalam pembuatan dan penyajian akun keuangan pemerintah. (Arza et al., 2021)

Akuntansi Pemerintahan

Layanan yang disebut akuntansi pemerintah memberi pihak yang berkepentingan akses ke berbagai lembaga pemerintah sehingga mereka dapat memperoleh informasi keuangan dari mereka. Keputusan ekonomi dapat dibuat dengan menggunakan data (Waworega, 2018: 2015). Akuntansi pemerintah atau sektor publik adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, menilai, dan melaporkan transaksi keuangan entitas publik dengan tujuan memberikan konsumen laporan keuangan

informasi keuangan yang bersangkutan sehingga mereka dapat membuat pilihan. (Ismail et al., 2021)

Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran memberikan ringkasan sumber, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya moneter dalam yurisdiksi pemerintah federal atau pemerintah kota. Laporan ini membandingkan pemanfaatan sumber daya keuangan aktual selama periode pelaporan dengan alokasi anggaran yang diproyeksikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah. (Untari, 2015)

Analisis Belanja Daerah

Untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah menangani anggaran daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis (value for money), diperlukan analisis belanja daerah. Penelitian ini mengkaji efektivitas penggunaan dana oleh pemerintah daerah, pengurangan limbah, dan alokasi dana mereka untuk inisiatif yang sesuai. (Tulangow & Runtu, 2014)

Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja karyawan yang diperoleh saat melaksanakan tanggung jawabnya. Sumber daya manusia sangat penting untuk menggunakan bakat sumber daya manusia untuk mencapai kinerja organisasi. Ini menunjukkan bahwa untuk memastikan bahwa sumber daya manusia dapat menyelesaikan tugas dengan benar dan memberikan hasil berkualitas tinggi, sangat penting untuk menilai keterampilan mereka. Agar orang termotivasi untuk bekerja, harus ada stimulasi teratur di tempat kerja. Banyak faktor, termasuk budaya, pelatihan, dan motivasi, berdampak pada kinerja. Untuk meningkatkan kinerja karyawan di dalam perusahaan, motivasi sangat penting. Proses yang mengarahkan intensitas, arah, dan keuletan individu untuk mencapai tujuan mereka dikenal sebagai motivasi. Bisnis mungkin menggunakan insentif untuk mencoba mendorong anggota staf untuk tampil pada tingkat tinggi di tempat kerja. (Hendra, 2020)

Defenisi Anggaran

Anggaran, yang biasanya untuk periode satu tahun, adalah rencana keuangan masa depan yang diwakili dalam istilah moneter. Anggaran organisasi adalah rencana jangka pendek yang menggabungkan beberapa proyek menjadi rencana keuangan

tahunan yang lebih menyeluruh. Otoritas yang lebih tinggi sering meninjau atau menilai ide-ide anggaran sebelum proses pembuatan anggaran resmi. Untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan standar hidup, pemerintah terutama menggunakan anggaran sebagai alat untuk mengatur kemajuan sosial dan ekonomi. Selain itu, anggaran merupakan instrumen penting untuk kebijakan keuangan pemerintah. (Basri, 2013)

METODE PENELITIAN

Untuk memverifikasi fakta-fakta dalam laporan realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan, informasi dikumpulkan melalui penggunaan teknik kualitatif deskriptif, yang didasarkan pada verbal (kata-kata) dan data numerik yang dinyatakan di lapangan. Teknik kualitatif digunakan untuk penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk masuk lebih dalam ke latar belakang, melihat fenomena, dan memahami realisasi anggaran daerah Badan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Medan.

Dalam hal ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih jauh ke dalam masalah yang dihadapi sambil memeriksa beragam perspektif, pengalaman, dan sudut pandang yang dipegang oleh anggota organisasi. Subjek penelitian ini adalah mereka yang berpartisipasi dalam permasalahan penelitian sebagai aktor atau penyedia informasi. Fokus utama dari penelitian ini adalah kepala manajemen anggaran. Bagian dari objek penelitian sementara adalah laporan kinerja pencapaian anggaran daerah di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan.

Data sekunder dari buku, jurnal, makalah, dan sumber lain yang berkaitan dengan subjek penelitian digunakan dalam penelitian ini. Efektivitas realisasi anggaran pada tahun 2018 dan 2022 dikaji dalam penelitian ini. Para sarjana menggunakan analisis varians dan rasio untuk menjelaskan hasil kinerja, kemandirian, dan realisasi anggaran. Penelitian dilakukan di kantor Badan Pembiayaan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan, yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 61, Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20159. Investigasi dilakukan pada tahun 2023 pada bulan Januari dan Februari.

Dalam penelitian ini, dokumen, arsip, atau sumber daya yang berkaitan dengan pemahaman topik penelitian dipelajari tanpa interaksi langsung, sesuai dengan teknik

pengumpulan data studi dokumentasi. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang ada, laporan realisasi anggaran, dan literatur. Teknik analisis data yang disebut analisis deskriptif digunakan untuk memahami dan memeriksa gambaran keuangan pemenuhan anggaran pemerintah Kota Medan 2018-2022. Dalam karya ini, dua perhitungan dalam teknik analisis - analisis kinerja pendapatan dan analisis kinerja pengeluaran — dibuat menggunakan perhitungan rasio sebagai instrumen.

- a) Analisis perbedaan pendapatan
- b) Analisis tingkat desentralisasi rasio
- c) Analisis rasio efektivitas pajak daerah
- d) Analisis perbedaan belanja anggaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan dievaluasi menggunakan data yang mencakup dari tahun 2018 hingga 2022. Secara khusus, pengukuran dilakukan terhadap kinerja laporan realisasi anggaran daerah dari waktu ke waktu. Analisis varians pendapatan.

Tahun	Anggaran	Realisasi	Total
2018	Rp. 13.037.539.478.554	Rp. 12.703.058.687.891	Rp. 334.480.790.663
2019	Rp. 14.043.339.334.970	Rp. 13.081.482.296.509	Rp. 952.857.048.461
2020	Rp. 13.077.362.353.824	Rp. 12.916.359.750.491	Rp. 161.002.603.333
2021	Rp. 7.802.901.013.566	Rp. 8.099.422.537.756	- Rp. 296.521.524.190
2022	Rp. 5.768.960.383.789	Rp. 5.760.344.387.619	Rp. 8.615.996.170

Sumber : Data yang diolah

Untuk melakukan analisis varians anggaran pendapatan, perbedaan antara pendapatan aktual dan yang direncanakan dihitung. Laporan yang dipublikasikan pemerintah daerah tentang realisasi anggaran biasanya mencakup dokumentasi anomali anggaran ini. Dengan pengetahuan tentang varians anggaran, pengguna laporan dapat mengevaluasi kinerja pendapatan secara lebih efektif. Jika kita meneliti pergerakan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Medan selama tahun anggaran 2018-2022, orang dapat melihat bahwa varians pendapatan dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa realisasi pendapatan kurang dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa dana Pemerintah Kota Medan belum terpakai secara maksimal. Unsur-unsur tertentu dari pendapatan daerah, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan sumber asli lokal lainnya, harus ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas.

Terutama ketika menyangkut komponen aliran pendapatan asli lokal yang merupakan bagian terbesar dari total pendapatan asli lokal, seperti denda kota lainnya. Pemerintah Kota Medan memiliki kewajiban untuk memaksimalkan pendapatan daerah karena merupakan sumber utama pendanaan untuk pertumbuhan kota. Perolehan pendapatan di luar jumlah yang dialokasikan, menurut pendapat Mahmudi (2020), dapat dilihat sebagai perbedaan positif yang menandakan kinerja keuangan pendapatan yang besar. Namun, jika terdapat perbedaan negatif (realisasi pendapatan kurang dari jumlah yang diharapkan), maka Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah tampak kurang menguntungkan. Baru pada tahun 2021 realisasi pendapatan melampaui anggaran, menunjukkan pencapaian keuangan pendapatan yang signifikan. Sebaliknya, nilai realisasi pendapatan pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2022 kurang dari jumlah yang direncanakan, menunjukkan bahwa kinerja keuangan pendapatan daerah dianggap negatif. Mengenai penelitian (Daling, 2013) mengatakan bahwa fakta bahwa lebih sedikit uang yang direalisasikan daripada yang diantisipasi adalah bukti ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2018	Rp. 5.732.425.486.154	Rp. 13.037.539.478.554	0,44
2019	Rp. 6.284.220.582.270	Rp. 14.034.339.344.970	0,44
2020	Rp. 5.434.682.028.854	Rp. 13.077.362.353.824	0,41
2021	Rp. 395.652.125.266	Rp. 7.802.901.013.566	0,05
2022	Rp. 570.807.696.354	Rp. 5.768.960.383.789	0,09

Sumber : Data yang diolah

Temuan dari studi tentang rasio tingkat desentralisasi untuk 2018-2022 (Pendapatan Asli Daerah: Total Pendapatan Daerah x 100%) menunjukkan seberapa besar kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah daerah telah diberikan oleh pemerintah federal untuk mengejar opsi untuk menghasilkan pendapatan. Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola desentralisasi. Untuk tahun 2018–2022, Pemerintah Kota Medan dapat menghitung tingkat desentralisasi dengan membagi pendapatan asli daerah dengan total pendapatan asli daerah (%).

Studi rasio derajat desentralisasi menunjukkan bahwa itu tetap stabil pada 2018 dan 2019, meningkat pada 2020, dan turun pada 2021 dan 2022. Tingkat desentralisasi berkurang pada 2020-2022 bahkan jika Pemerintah Kota Medan tidak menunjukkan perubahan yang nyata dalam hal ini pada 2018-2019. Kualitas dan outcome yang

dihasilkan Pemerintah Kota Medan untuk membantu inisiatif pembangunan daerah masih terus ditingkatkan. Ketika mengevaluasi kapasitas suatu daerah untuk kemerdekaan dan kemampuannya untuk tidak terlalu bergantung pada pembayaran transfer dari pemerintah federal dan lokal, tingkat desentralisasi memainkan peran penting.

Faktor pendorong utama di balik pertumbuhan eksplosif Kota Medan adalah pendapatan lokalnya, yang secara konsisten naik ke tingkat yang terkenal dan besar, menghilangkan kebutuhan akan transfer keuangan dari pemerintah federal dan provinsi. Menurut Mahmudi (2019), kemampuan desentralisasi pemerintah daerah berkorelasi dengan perluasan pendapatan asli daerah (PAD). Provinsi Sumatera Utara berdiri untuk mendapatkan dan memperkuat dari kekuasaan Pemerintah Kota Medan untuk menjadi zona otonom. Menurut informasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2011, pemerintah daerah diizinkan untuk menggunakan desentralisasi asalkan persentase desentralisasi lebih dari 50%. Menurut publikasi, hasil perhitungan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan belum dapat sepenuhnya melaksanakan desentralisasi. Mengenai penelitian (Honga & Ilat, 2014) Karena tidak mampu memenuhi tujuan anggaran, tingkat desentralisasi yang dicapai pada tahun 2013 menunjukkan bahwa ekstraksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah. Oleh karena itu, dengan mengenali potensi yang sudah ada atau meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan PAD, Pemerintah Kota Bitung harus meningkatkan upaya untuk meningkatkan PAD.

Analisis Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2018	Rp. 5.219.324.543.311	Rp. 5.214.897.141.497	100%
2019	Rp. 5.058.443.944.654	Rp. 5.171.010.378.283	98%
2020	Rp. 5.071.597.922.390	Rp. 4.926.456.652.305	103%
2021	Rp. 5.730.574.818.536	Rp. 5.706.083.586.846	100%
2022	Rp. 6.646.504.121.057	Rp. 6.420.264.692.967	104%

Sumber : Data yang diolah

Temuan studi rasio efektivitas pajak daerah untuk periode 2018-2022 ditawarkan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak daerah. Rasio dihitung dengan membagi realisasi pajak daerah dengan tujuan pajak daerah, atau realisasi pajak daerah dengan 100% dari target pajak daerah. Efektivitas ditentukan dengan membandingkan output yang diinginkan dengan hasil aktual. Seperti yang ditunjukkan oleh angka-angka dari perhitungan rasio efektivitas

Pemerintah Kota Medan 2018-2022, efektivitas merupakan komponen penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Hasil yang menonjol menunjukkan efektivitas pajak daerah Pemerintah Kota Medan. Setelah puncaknya di tahun 2018, terjadi penurunan di tahun 2019, kenaikan di tahun 2020, penurunan di tahun 2021, dan masih ada lagi kenaikan di tahun 2022. Mengingat tindakan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 semuanya sangat sukses. Pencapaian tingkat efisiensi pajak daerah yang tinggi oleh Pemerintah Kota Medan pada tahun 2022 merupakan pencapaian yang mengesankan. Pemerintah Kota Medan harus melakukan upaya lebih dari sebelumnya untuk mencapai tingkat efektivitas pajak daerah yang menonjol pada tahun 2022. Tujuan pemerintah Kota Medan untuk membangun kemandirian daerah akan sangat dipengaruhi oleh pencapaian luar biasa ini. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa Tax Effectiveness Ratio sebesar 100% dianggap dapat diterima. Angka-angka di atas memperjelas bahwa rasio efektivitas pajak mencapai 100-104% pada tahun 2018, 2020, 2021, dan 2022, yang dianggap sebagai tingkat efektivitas yang terhormat. Meski begitu, rasio pada 2019 hanya 98%, yang masih dipandang memadai atau berhasil mencapai tingkat efektivitas pajak yang diinginkan. (Yakub et al., 2022) Rasio efektivitas pajak daerah dihitung selama periode tujuh tahun, dari 2013 hingga 2019, dan hasilnya menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat kuat, dengan rasio rata-rata 105%. Rasio efektivitas pajak daerah tergolong sangat efektif dengan nilai 84% pada tahun 2015, dan mencapai rasio tertinggi sebesar 117% pada tahun 2018.

Analisis Varians Anggaran Belanja

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2018	Rp. 10.993.656.938.251	Rp. 12.290.330.450.127	- Rp. 1.296.673.511.876
2019	Rp. 13.527.855.950.251	Rp. 14.726.662.153.406	- Rp. 1.198.806.203.155
2020	Rp. 10.935.643.264.218	Rp. 11.494.671.486.409	- Rp. 559.028.222.191
2021	Rp. 2.626.732.767.777	Rp. 2.659.960.360.858	- Rp. 33.227.593.081
2022	Rp. 3.199.554.286.746	Rp. 3.130.100.840.197	Rp. 69.453.446.549

Sumber : Data yang diolah

Ada perbedaan antara perkiraan anggaran dan pengeluaran aktual, menurut penelitian tentang perubahan anggaran untuk 2018-2022. Mencermati varians dari anggaran pada era ini, Pemerintah Kota Medan menemukan bahwa belanja aktual selama ini lebih rendah dari proyeksi untuk tahun 2018 hingga 2022. Bertentangan dengan apa yang dikatakan, belanja pemerintah Kota Medan sebenarnya kurang dari yang direncanakan, terutama ketika menyangkut belanja modal barang dan jasa. Hal ini berdampak pada perkembangan Perhitungan Anggaran Waktu Surplus (SILPA). Menurut aturan yang menyatakan bahwa jika ada perbedaan yang lebih besar, pengeluaran tidak dinilai telah berkinerja baik secara keuangan dan sebaliknya, kinerja keuangan terkait pengeluaran mungkin terlihat positif. Apabila nilai realisasi anggaran melebihi nilai yang dianggarkan pada tahun 2022, maka kinerja keuangan belanja dianggap tidak memuaskan; Namun, ketika nilai realisasi anggaran kurang dari nilai yang dianggarkan pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021, kinerja keuangan dianggap sangat baik. (Syafitri et al., 2014).

Varians pengeluaran negatif, sebagaimana ditentukan oleh perhitungan, berarti bahwa Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Musi Kas telah merealisasikan pengeluaran yang lebih sedikit daripada anggaran yang dialokasikan untuk itu. Temuan perhitungan varians dapat digunakan untuk mengamati efisiensi anggaran; Varians negatif menunjukkan pemanfaatan uang yang lebih efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Medan ditunjukkan oleh analisis studi variasi pendapatan, rasio derajat desentralisasi, efektivitas pajak daerah, dan analisis variasi anggaran untuk tahun 2018-2022. Analisis perubahan pendapatan dari 2018 ke 2022 mengungkapkan bahwa realisasi anggaran di bawah jumlah yang diantisipasi, menunjukkan bahwa pemerintah Medan belum mampu merealisasikan pendapatannya. Ada variasi penting dalam pendapatan asli lokal seperti yang ditunjukkan oleh rasio derajat desentralisasi, termasuk keuntungan dan penurunan. Realisasi dan anggaran pajak daerah berbeda secara signifikan dalam hal efektivitas perpajakan daerah. Pemerintah Kota Medan juga mampu mendapatkan surplus SILPA, menunjukkan kelebihan estimasi anggaran yang tersisa, menurut kajian varians anggaran.

Disarankan agar seluruh pegawai, khususnya yang bekerja di perbendaharaan badan pembiayaan aset daerah pemerintah Kota Medan, menjaga dan meningkatkan kinerjanya dalam pencapaian APBD sesuai dengan harapan pemerintah Kota Medan. Untuk bersaing dengan benar tanpa membahayakan orang lain, orang harus berada dalam lingkungan kerja yang kompetitif. Hasil penelitian perlu lebih memperjelas dan memotivasi penelitian di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Arza, O., Syafitri, Y., Delori, :, & Meyla, N. (2021). *The Effect Of Human Resources, Application Of Government Accounting Standards And Accounting Information Systems On The Quality Of Financial Reports In The Government Of The City Of Padang Panjang*. *Pareso Jurnal*, 3(3), 519–542.
- Basri, R. (2013). *Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal EMBA*, 1(4), 202–212.
- Daling, M. (2013). *Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*. *Jurnal EMBA*, 1(3), 82–89.
- Hendra, H. (2020). *Pengaruh Budaya Organisasi, Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Universitas Tjut Nyak Dhien Medan*. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v3i1.4813>
- Honga, A., & Ilat, V. (2014). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung*. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 278–288.
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma*. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Ismail, Y. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2021). *Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.5 tentang akuntansi Persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(3), 249–257.
- Pemerintah Kota Semarang. (2018). *Catatan Atas Laporan Keuangan 2018*.
- Syafitri, A., Nurbaiti, & Yanti, F. (2014). *Analisis Varians, Pertumbuhan, Keserasian Belanja Dalam Menilai Kinerja Anggaran Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas*. *Smart Accounting Journal*, 37–49.
- Tulangow, A. P., & Runtu, T. (2014). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan*

Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2(4), 564–571.

Untari, R. (2015). *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang. Universitas Dian Nuswantoro: Semarang.*

Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Volume 19 Issue 1 (2022) Pages 15-28 KINERJA : Jurnal Ekonomi dan Manajemen ISSN : 1907-3011 (Print) 2528-1127 (Online) *Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah Analysis. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 19(1), 15–28.* <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10789>.